

**PERANAN ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN
MEKANIKAL INDONESIA DALAM MENERBITKAN
SERTIFIKAT BADAN USAHA**
Studi pada Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan
Mekanikal Indonesia Sumatera Barat

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ELVINA SANTI
01 140 135

Program Kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No. Reg : 1984 / FK II / 08 / 05

	No. Alumni Universitas 49510	ELVINA SANTI	No. Alumni Fakultas 5874
a). Tempat/Tanggal lahir : Talang, 20 Juni 1983 b). Nama Orang Tua : Aliunar Khatib Bandaro dan Syafrida c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Perdata Ekonomi e). NBP : 01140135 f). Tanggal Lulus : 31 Agustus 2005 g). Predikat Lulus : Dengan Pujian h). IPK : 3,51 i). Lama Studi : 4 Tahun j). Alamat Orang Tua : Jl Bandar Olo Aro Talang-Solok.			
<p style="text-align: center;">Peranan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Badan Usaha Studi pada Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Sumatera Barat <i>Skripsi SI oleh Elvina Santi, Pembimbing 1. Dr. Ad. Saptomo, SH, MA, Pembimbing 2. Daswirman SH, MH.</i></p>			
<p style="text-align: center;">ABSTRAK</p>			
<p>Asosiasi kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia merupakan asosiasi perusahaan yang menghimpun kontraktor yang memiliki izin usaha dibidang ketenagalistrikan. Perizinan tersebut diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha yang dijadikan dasar untuk mengikuti pelelangan/tender sesuai dengan Golongan, Klasifikasi dan Kualifikasi. Oleh karena itu fokus skripsi ini akan membahas tentang Peranan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Badan Usaha, Tata cara penerbitan Sertifikat Badan Usaha, Kendala yang ditemui dalam penerbitan sertifikat serta Upaya penyelesaian.</p>			
<p>Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, digunakan pendekatan yuridis sosiologis, sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data-data yang terkumpul terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif.</p>			
<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Sumatera Barat berperan dalam menerbitkan Sertifikat Badan Usaha yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Asosiasi. Perusahaan yang ingin mengikuti sertifikasi harus menyampaikan formulir permohonan yang dilengkapi dengan lampiran yang memuat data perusahaan kepada Dewan Pengurus Cabang setempat yang nantinya akan dilanjutkan kepada Dewan Pengurus Daerah AKLI Sumatera Barat. Kendala-kendala yang ditemui di lapangan bersifat administrasi semata yang mana penanganannya oleh Dewan Pengurus Daerah AKLI melalui diintensifikannya pemberian informasi sebagai wujud pengayoman kepada para anggotanya.</p>			

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meraih cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mengisi cita-cita perjuangan maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan nasional dapat tercapai sesuai dengan tujuan falsafah yang mendasari perjuangan kemerdekaan yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan meningkatnya pembangunan sebagaimana tercantum dalam Repelita telah mengintrodusir pembangunan dengan teknik moderen dengan bentuk-bentuk yang beraneka ragam, corak, dan bentuknya yang disalurkan melalui proyek pemerintah maupun swasta¹.

Berdasarkan itu semua dapatlah dikatakan bahwa dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana ataupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spritual.

¹ Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongang Bangunan*, 1982, h. 1.

Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Salah satunya adalah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), yang dibentuk pada tanggal 24 September 1980, yang merupakan satu anggota dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1999 yang merupakan suatu lembaga yang independen dan mandiri yang beranggotakan wakil-wakil Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Pakar dan Perguruan Tinggi serta Pemerintah, yang dilahirkan atas perjanjian bersama. Keberadaan LPJK ini merupakan konsekuensi yuridis dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berfungsi sebagai lembaga penentu dan mempunyai kompetensi untuk melakukan akreditasi Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi untuk menerbitkan sertifikasi bagi perusahaan dan profesi jasa konstruksi dan selanjutnya menjadi dasar bagi Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi untuk menerbitkan sertifikasi bagi perusahaan dan profesi jasa konstruksi, dimana sebelumnya kewenangan ini adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah yang dikenal dengan Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang diterbitkan oleh Gubernur di setiap propinsi dengan prosedur dan persyaratan tertentu, yang akan menjadi bukti pengakuan badan usaha jasa konstruksi untuk dapat mengikuti proses pelelangan proyek-proyek pemerintah khususnya dan usaha jasa konstruksi pada umumnya.

LPJK ini mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu:

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian yang terdapat dalam BAB III yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dapat ditarik kesimpulan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Peranan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Sumatera Barat, dalam menerbitkan Sertifikat Badan Usaha adalah sangat penting mengingat bahwa prosesi bagi badan usaha untuk mendapatkan Sertifikasi Badan Usaha yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan, adalah melalui asosiasi pelaku usaha yang telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Jadi dapat dikatakan bahwa DPD AKLI Sumbar sebagai wadah penyambung antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang berkewajiban memberikan pengayoman kepada seluruh anggotanya agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik
2. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Badan Usaha oleh Badan Sertifikasi Asosiasi Daerah (BSAD) AKLI Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) harus sudah terdaftar menjadi anggota Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) melalui permohonan yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Daerah AKLI Sumatera Barat atau melalui Dewan Pengurus Cabang AKLI tempat BUJK berada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dari Buku

- Anonim, 2003, *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Fokusmedia, Bandung.
- Anonim, 1984, *Pedoman Prakuifikasi Sebagai Pelaksanaan Keppres Nomor 29 Tahun 1984*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andy Kirana, tth. *Etika Bisnis Konstruksi*, ttp.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT..Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumaldi, 1996, *Hukum Bangunan, Dasar Hukum Bangunan Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Endang Sri wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan widjaja, 2002, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazarkhan Yasin, 1998, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian sengketa Konstruksi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Prijono widooningrat et.al., *ISO 9000 Untuk Kontraktor*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soegeng Djojowirono, 1998, *Manajemen Konstruksi*, Biro Penerbit Teknik Sipil UGM, yogyakarta.
- Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta.
- Zahirman zabir, 2004, *Jasa Konstruksi Dalam Hukum Bisnis*, Zahirman Zabir & Associates Advocates & Legal Consultant, Pekanbaru.

2. Dari Jurnal, Makalah, Seminar.

- Musyawaharah Cabang Luar Biasa AKLI Padang, 2004, Pusklat Bhakti Bunda, Padang.